

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	SKPD	BAPPEDA KOTA PARIAMAN
	Program	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang RKPD
	Tujuan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan Publikasi pembangunan Kota Pariaman dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, keschatan, agama dan sosial budaya.
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Berdasarkan hasil sensus tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Timur adalah berjumlah: 15.526,-, yang terdiri dari laki-laki 7.641 (49,21%) dan perempuan 7.885 (50,79%), Kecamatan Pariaman Tengah adalah berjumlah : 30.457,- yang terdiri dari laki – laki 15.199 (49,90%) dan perempuan 15.258 (50,10%), Kecamatan Pariaman Utara adalah berjumlah : 21.446,- yang terdiri dari laki – laki 10.470 (48,82%) dan perempuan 10.976 (51,18%) dan Kecamatan Pariaman Selatan adalah berjumlah : 18.262,- yang terdiri dari laki- laki 8.975 (49,14%) dan perempuan 9.287 (50,86%). Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat kota mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di tingkat kota lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)
		Dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang mayoritas dihadiri oleh laki laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sebagai berikut : a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah, kegiatan bisa dilaksanakan tanpa kendala. b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.

			d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
BARIS 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender, 2. Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan. 3. Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan; b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Peningkatan kualitas perencanaan yang menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan
BARIS 7	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di Tingkat Kota Pariaman. 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarusutamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Baseline data	<p>Kegiatan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan usulan kegiatan di tingkat Kota Pariaman. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2017, tingkat kehadiran peserta mayoritas didominasi oleh laki-laki yaitu $\pm 80\%$ dari perempuan, dimana kehadirannya hanya sekitar $\pm 20\%$. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kehadiran peserta Musrenbang lebih dominan dihadiri oleh kaum laki-laki dengan perbandingan kehadiran laki-laki lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah peserta musrenbang.</p> <p>Ditinjau dari fasilitator juga di dominasi kaum laki-laki-laki yaitu 1 berbanding 4, begitu juga dengan pateri atau nara sumber, juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi $\pm 80\%$. Sehingga usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang tingkat kota sifatnya berupa fisik prasarana untuk umum dan sangat minim mengusulkan yang menjadi kebutuhan untuk perempuan yang merupakan penduduk mayoritas.</p>
BARIS 9		Indikator kinerja	<p>input:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang tingkat kota menghadirkan 3 laki-laki, 2

			<p>perempuan/per kelurahan/desa; dengan memperhatikan responsif gender</p> <p>3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender</p> <p>output: Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah terhadap penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>outcomes: Terakomodirnya rencana pembangunan di tingkat kota yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
--	--	--	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: BAPPEDA KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN	: 2018
PROGRAM	Perencanaan Pembangunan Daerah
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	<p>1.Data Pembuka Wawasan</p> <p>Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Timur adalah berjumlah: 15.526,- jiwa, yang terdiri dari laki-laki 7.641 (49,21%) dan perempuan 7.885 jiwa (50,79%) . Kecamatan Pariaman Tengah adalah berjumlah : 30.457,- yang terdiri dari laki – laki 15.199 (49,90%) dan perempuan 15.258 (50,10%), Kecamatan Pariaman Utara adalah berjumlah : 21.446,- yang terdiri dari laki – laki 10.470 (48,82%) dan perempuan 10.976 (51,18%) dan Kecamatan Pariaman Selatan adalah berjumlah : 18.262,- yang terdiri dari laki- laki 8.975 (49,14%) dan perempuan 9.287 (50,86%). Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan dari pada laki-laki. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat kota mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Kelurahan lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>A. Faktor Kesenjangan</p> <p>Keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan forum musrenbang akan menimbulkan beberapa permasalahan dan kesenjangan seperti sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; <p>B. Faktor Kesenjangan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan

	<p>Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender</p> <p>b) Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan.</p> <p>c) Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender</p> <p>C. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>Input :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang kelurahan dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per kelurahan/desa; dengan memperhatikan responsif gender. 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender. <p>Output :</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>Outcomes :</p> <p>Terakomodirnya rencana pembangunan di tingkat kota yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 142.290.000,-
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di Tingkat Kota . 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarus utamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender
Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota Pariaman.
	Masukan Rp. 142.290.000,-
	Keluaran Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan
	Hasil Terakomodirnya rencana pembangunan di tingkat kota yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	SKPD	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
	Tujuan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Musrembang dan Publikasi pembangunan Kecamatan Pariaman Selatan dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya.
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Berdasarkan hasil sensus tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Selatan adalah berjumlah : 18.262,- yang terdiri dari laki- laki 8.975 (49,14%) dan perempuan 9.287 (50,86%). Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)
		Dalam pelaksanaan kegiatan Musrembang mayoritas dihadiri oleh laki laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sebagai berikut : a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah, kegiatan bisa dilaksanakan tanpa kendala. b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari desa apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
BARIS 4	Sebab	1. Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan

		Kesenjangan Internal (di SKPD)	<p>Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender,</p> <p>2. Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan.</p> <p>3. Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender</p>
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Peningkatan kualitas perencanaan yang menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan
BARIS 7	Rencana Aksi		<p>1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di Desa dan kecamatan.</p> <p>2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarusutamaan gender</p> <p>3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender</p>
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Baseline data	<p>Kegiatan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2017, tingkat kehadiran peserta mayoritas didominasi oleh laki-laki yaitu $\pm 80\%$ dari perempuan, dimana kehadirannya hanya sekitar $\pm 20\%$. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kehadiran peserta Musrenbang lebih dominan dihadiri oleh kaum laki-laki dengan perbandingan kehadiran laki-laki lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah peserta musrenbang.</p> <p>Ditinjau dari fasilitator juga di dominasi kaum laki-laki-laki yaitu 1 berbanding 4, begitu juga dengan pemateri atau nara sumber, juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi $\pm 80\%$. Sehingga usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang desa dan kecamatan sifatnya berupa fisik prasarana untuk umum dan sangat minim mengusulkan yang menjadi kebutuhan untuk perempuan yang merupakan penduduk mayoritas.</p>
BARIS 9		Indikator kinerja	<p>input:</p> <p>1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang</p> <p>2. Peserta musrenbang Desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per kelurahan; dengan memperhatikan responsif gender</p> <p>3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender</p> <p>output:</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah terhadap penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p>

			<p>outcomes: Terakomodirnya rencana pembangunan di Desa dan kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
--	--	--	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN	: 2018
PROGRAM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
KEGIATAN	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Selatan adalah berjumlah : 18.262,- yang terdiri dari laki- laki 8.975 (49,14%) dan perempuan 9.287 (50,86%). Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan dari pada laki-laki. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki, yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>A. Faktor Kesenjangan Keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan forum musrenbang akan menimbulkan beberapa permasalahan dan kesenjangan seperti sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; <p>B. Faktor Kesenjangan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender b) Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan. c) Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender

	<p>C. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>							
CAPAIAN PROGRAM	<p>Input :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per kelurahan; dengan memperhatikan responsif gender. 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender. <p>Output :</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>Outcomes :</p> <p>Terakomodirnya rencana pembangunan di desa dan kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>							
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 29.450.000,-							
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di desa dan kecamatan. 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarus utamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender 							
	Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa dan Kecamatan.						
		<table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 29.450.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 29.450.000,-	Keluaran	Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan	Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Masukan		Rp. 29.450.000,-						
Keluaran		Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan						
Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas							

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	SKPD	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	
	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	
	Tujuan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan Publikasi pembangunan Kelurahan/Desa dan Kecamatan Pariaman Tengah dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya.	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Berdasarkan hasil sensus tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Tengah adalah berjumlah : 30.457,- yang terdiri dari laki – laki 15.199 (49,90%) dan perempuan 15.258 (50,10%). Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Kelurahan/desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.	
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang mayoritas dihadiri oleh laki laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sebagai berikut :</p> <p>a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah, kegiatan bisa dilaksanakan tanpa kendala.</p> <p>b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas;</p> <p>c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.</p> <p>d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;</p>

BARIS 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender, 2. Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan. 3. Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan; b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Peningkatan kualitas perencanaan yang menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan
BARIS 7	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di kelurahan/desa dan kecamatan. 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarusutamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Baseline data	<p>Kegiatan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan usulan kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2017, tingkat kehadiran peserta mayoritas didominasi oleh laki-laki yaitu $\pm 80\%$ dari perempuan, dimana kehadirannya hanya sekitar $\pm 20\%$. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kehadiran peserta Musrenbang lebih dominan dihadiri oleh kaum laki-laki dengan perbandingan kehadiran laki-laki lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah peserta musrenbang.</p> <p>Ditinjau dari fasilitator juga di dominasi kaum laki-laki-laki yaitu 1 berbanding 4, begitu juga dengan pemateri atau nara sumber, juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi $\pm 80\%$. Sehingga usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan sifatnya berupa fisik prasarana untuk umum dan sangat minim mengusulkan yang menjadi kebutuhan untuk perempuan yang merupakan penduduk mayoritas.</p>
BARIS 9		Indikator kinerja	<p>input:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per kelurahan/desa; dengan memperhatikan responsif gender 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender <p>output:</p>

			<p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah terhadap penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>outcomes: Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan/desa dan kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
--	--	--	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN	: 2018
PROGRAM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
KEGIATAN	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	<p>1.Data Pembuka Wawasan</p> <p>Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Tengah adalah berjumlah : 30.457,- yang terdiri dari laki – laki 15.199 (49,90%) dan perempuan 15.258 (50,10%),. Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan dari pada laki-laki. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Kelurahan/desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>A.Faktor Kesenjangan Keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan forum musrenbang akan menimbulkan beberapa permasalahan dan kesenjangan seperti sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; <p>B. Faktor Kesenjangan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender b) Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan. c) Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender

	<p>C. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>							
CAPAIAN PROGRAM	<p>Input :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang Peserta musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per kelurahan/desa; dengan memperhatikan responsif gender. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender. <p>Output :</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>Outcomes :</p> <p>Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan/desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>							
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 61.230.000,-							
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di kelurahan/desa dan kecamatan. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarus utamaan gender Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender 							
	Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan/desa dan Kecamatan.						
		<table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 61.230.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan/desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 61.230.000,-	Keluaran	Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan	Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan/desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Masukan		Rp. 61.230.000,-						
Keluaran		Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan						
Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di kelurahan/desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas							

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	SKPD	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	
	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	
	Tujuan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Musrembang dan Publikasi pembangunan Desa dan Kecamatan Pariaman Timur dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya.	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Berdasarkan hasil sensus tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Timur adalah berjumlah: 15.526,-, yang terdiri dari laki-laki 7.641 (49,21%) dan perempuan 7.885 (50,79%), Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pematari atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.	
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan Musrembang mayoritas dihadiri oleh laki laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sebagai berikut :</p> <p>a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah, kegiatan bisa dilaksanakan tanpa kendala.</p> <p>b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari desa apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas;</p> <p>c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.</p> <p>d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;</p>
BARIS 4		Sebab	1. Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan

		Kesenjangan Internal (di SKPD)	<p>Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender,</p> <p>2. Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan.</p> <p>3. Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender</p>
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Peningkatan kualitas perencanaan yang menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan
BARIS 7	Rencana Aksi		<p>1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di Desa dan kecamatan.</p> <p>2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarusutamaan gender</p> <p>3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender</p>
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Baseline data	<p>Kegiatan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2017, tingkat kehadiran peserta mayoritas didominasi oleh laki-laki yaitu $\pm 80\%$ dari perempuan, dimana kehadirannya hanya sekitar $\pm 20\%$. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kehadiran peserta Musrenbang lebih dominan dihadiri oleh kaum laki-laki dengan perbandingan kehadiran laki-laki lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah peserta musrenbang.</p> <p>Ditinjau dari fasilitator juga di dominasi kaum laki-laki-laki yaitu 1 berbanding 4, begitu juga dengan pemateri atau nara sumber, juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi $\pm 80\%$. Sehingga usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang desa dan kecamatan sifatnya berupa fisik prasarana untuk umum dan sangat minim mengusulkan yang menjadi kebutuhan untuk perempuan yang merupakan penduduk mayoritas.</p>
BARIS 9		Indikator kinerja	<p>input:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per desa; dengan memperhatikan responsif gender 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender <p>output:</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah terhadap penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p>

			<p>outcomes: Terakomodirnya rencana pembangunan di desa dan kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
--	--	--	--

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2018

PROGRAM : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

KODE PROGRAM

**ANALISIS
SITUASI**

1. Data Pembuka Wawasan

Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Timur adalah berjumlah: 15.526,- jiwa, yang terdiri dari laki-laki 7.641 (49,21%) dan perempuan 7.885 jiwa (50,79%) . Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan dari pada laki-laki. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki, yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

A. Faktor Kesenjangan

Keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan forum musrenbang akan menimbulkan beberapa permasalahan dan kesenjangan seperti sbb:

- a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah
- b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas;
- c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.
- d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;

B. Faktor Kesenjangan Internal

- a) Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender
- b) Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan.
- c) Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender

	<p>C. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>		
CAPAIAN PROGRAM	<p>Input :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per desa; dengan memperhatikan responsif gender. 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender. <p>Output : Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>Outcomes : Terakomodirnya rencana pembangunan di desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 26.408.000,-		
RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di desa dan kecamatan. 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarus utamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender 	
	Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan.	
		Masukan	Rp. 26.408.000,-
		Keluaran	Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan
	Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas	

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	SKPD	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	
	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	
	Tujuan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Musrembang dan Publikasi pembangunan Desa dan Kecamatan Pariaman Utara dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya.	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Berdasarkan hasil sensus tahun 2016 Jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Utara adalah berjumlah : 21.446,- yang terdiri dari laki – laki 10.470 (48,82%) dan perempuan 10.976 (51,18%) Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.	
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	Dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang mayoritas dihadiri oleh laki laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sebagai berikut : a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah, kegiatan bisa dilaksanakan tanpa kendala. b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari desa apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
BARIS 4		Sebab	1. Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan

		Kesenjangan Internal (di SKPD)	<p>Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender,</p> <p>2. Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan.</p> <p>3. Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender</p>
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Peningkatan kualitas perencanaan yang menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan
BARIS 7	Rencana Aksi		<p>1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di desa dan kecamatan.</p> <p>2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarusutamaan gender</p> <p>3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender</p>
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Baseline data	<p>Kegiatan Musrenbang bertujuan untuk merumuskan usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2017, tingkat kehadiran peserta mayoritas didominasi oleh laki-laki yaitu $\pm 80\%$ dari perempuan, dimana kehadirannya hanya sekitar $\pm 20\%$. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kehadiran peserta Musrenbang lebih dominan dihadiri oleh kaum laki-laki dengan perbandingan kehadiran laki-laki lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah peserta musrenbang.</p> <p>Ditinjau dari fasilitator juga didominasi kaum laki-laki-laki yaitu 1 berbanding 4, begitu juga dengan pemateri atau nara sumber, juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi $\pm 80\%$. Sehingga usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang desa dan kecamatan sifatnya berupa fisik prasarana untuk umum dan sangat minim mengusulkan yang menjadi kebutuhan untuk perempuan yang merupakan penduduk mayoritas.</p>
BARIS 9		Indikator kinerja	<p>input:</p> <p>1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang</p> <p>2. Peserta musrenbang desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per desa; dengan memperhatikan responsif gender</p> <p>3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender</p> <p>output:</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah terhadap penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan</p>

			<p>outcomes: Terakomodirnya rencana pembangunan di desa dan kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>
--	--	--	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: KECAMATAN PARIAMAN UTARA
TAHUN ANGGARAN	: 2018
PROGRAM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
KEGIATAN	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	<p>1.Data Pembuka Wawasan</p> <p>Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pariaman Utara adalah berjumlah : 21.446,- yang terdiri dari laki – laki 10.470 (48,82%) dan perempuan 10.976 (51,18%) Atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Artinya lebih banyak permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan dari pada laki-laki. Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (80%) dan perempuan hanya ± 20%. Dilihat dari fasilitator lebih dominan dari kaum laki-laki-laki. yaitu 1 berbanding 4, dan begitu juga dengan pemateri atau nara sumber juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi ± 90%. Jika ditinjau dari banyaknya usulan yang dihasilkan dalam proses musrenbang di Desa lebih banyak usulan sifatnya fisik prasarana dan sangat minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>A. Faktor Kesenjangan</p> <p>Keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan forum musrenbang akan menimbulkan beberapa permasalahan dan kesenjangan seperti sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ditinjau dari aspek akses : tidak ada masalah b) Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari desa apakah menjadi prioritas di tingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas; c) Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang. d) Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; <p>B. Faktor Kesenjangan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan Fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep Gender b) Adanya kesenjangan Gender, dimana laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan penting dari perempuan. c) Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender

	<p>C. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p> <p>b) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan, dimana perempuan dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada.</p>	
CAPAIAN PROGRAM	<p>Input :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang 2. Peserta musrenbang desa dan kecamatan menghadirkan 3 laki-laki, 2 perempuan/per desa; dengan memperhatikan responsif gender. 3. Fasilitator dan Narasumber yang responsif Gender. <p>Output :</p> <p>Dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan</p> <p>Outcomes :</p> <p>Terakomodirnya rencana pembangunan di desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas</p>	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 28.400.000,-	
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kehadiran perempuan dalam mengikuti kegiatan musrenbang di desa dan kecamatan. 2. Peningkatan SDM Fasilitator dan Narasumber tentang pengarus utamaan gender 3. Membuat acuan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang Responsif Gender 	
	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan.	
	Masukan	Rp. 28.400.000,-
Kegiatan	Keluaran	Dokumen prioritas pembangunan yang responsif gender, dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki2 dan perempuan
	Hasil	Terakomodirnya rencana pembangunan di desa yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan Program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : Operasional Bus Sekolah Tujuan : Tenwujudnya keselamatan berlalu lintas	Data Pembuka Wawasan Data jumlah bus sekolah yang dioerasionalkan : 9 unit Data jumlah sekolah yang dilayani oleh layanan bus sekolah : 20 Data rata-rata jumlah penumpang bus sekolah (laki-laki dan perempuan) : rata-rata 40 org untuk 1 bus/trayek Laki-laki : 15 prg/bus/trayek Perempuan : 25 org/bus/trayek Data tingkat kecelakaan lainn : ± 5 kali kecelakaan lainn/bh Data jumlah siswa di Kota Pariaman : 80.000 org, Data jumlah awak operasional bus sekolah	Faktor Kesenjangan Pada kegiatan operasional bus sekolah, dari kondisi dilapangan diketahui adanya factor kesenjangan : <ul style="list-style-type: none"> • Data partisipasi : Untuk awak (sopir dan kenek) bus sekolah belum mengakomodir keselarasan gender, karena masih terbatas untuk laki-laki • Data akses Layanan operasional bus sekolah belum melayani seluruh sekolah yang ada di Kota Pariaman • Data manfaat Tidak terdapat kesenjangan • Data Kontrol <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk pelayanan dari operasional bus sekolah belum disediakan kotak pengaduan ○ Kondisi bus sekolah belum dilakukan pemisahan antara tempat duduk laki-laki dan perempuan 	ISU GENDER Penyebab terjadinya isu gender secara internal adalah Pemko Pariaman dalam hal ini Dishub Kominfo pada proses perencanaan (kondisi sarana/operasional bus sekolah) kegiatan ini belum mengakomodir responsive gender.	Sebab Kesenjangan Eksternal Pola pikir dan budaya masyarakat yang masih belum peduli terkait pentingnya keselamatan lalu lintas. Masih banyak pelajar yang memakai kendaraan pribadi kesekolah.	Sebab Kesenjangan Internal Mewujudkan keselamatan lalu lintas khususnya bagi pelajar dengan mengakomodir responsive gender	Reformulasi Tujuan Melakukan penambahan silker/logo pada bus sekolah terkait pemisahan tempat duduk perempuan dan laki-laki	Rencana Aksi Melakukan open recruitment terkait penerimaan sopir dan kenek bus sekolah dengan memperhatikan responsive gender	Basis Data (Line) Pelayanan bus beroperasi dari September 2015 Jumlah bus sel yang beroperasi 2015 3 unit Jumlah bus sel yang beroperasi 2016 9 unit Layanan trayek sekolah tahun 2015 sebanyak Layanan trayek sekolah tahun sebanyak 4 tra

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (sopir/kenek) sopir 9 org laki-laki, perempuan 0 org Kenek 4 org laki-laki, 0 orang perempuan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Line)
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Line)
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			
Konsumen Nasional.		<p>Kesenjangan: Akses: Tidak terdapat kesenjangan dalam akses kegiatan</p> <p>Partisipasi: Terdapat kesenjangan partisipasi gender dalam peserta kegiatan. Kontrol: tidak terdapat kesenjangan kontrol dalam kegiatan ini. Manfaat: tidak ada kesenjangan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan ini.</p>				<p>✓ Duta yang dipilih tidak hanya satu tapi beberapa sehingga bisa mewakili dari beberapa klasifikasi, anak usia sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak. ✓ Waktu yang dipilih harus dipikirkan dengan pertimbangan-pertimbangan sehingga partisipasi masyarakat bisa maksimal.</p>	

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
<p>Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan</p> <p>Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengawasan</p> <p>Tujuan : Agar Kepatuhan penyelesaian dan Rekomendasi, Ketepatan waktu pelaksanaan Kegiatan barang dan jasa, realisasi dana desa dan penyerapan Anggaran.</p>	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <p>Kondisi Real Belum adanya Edaran Walikota Pariaman dalam pelaksanaan Penguangan (KUA - PPAS) untuk SKPD apa saja yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penguangan yang berbasis gender.</p>	<p>Faktor Kesenjangan</p> <p>Akibat belum adanya Surat Edaran untuk SKPD yang penganggarannya berbasis gender maka belum ada satupun partisipasi SKPD yang menyampaikan anggaran yang berbasis gender.</p> <p>4 Aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat 	<p>Sebab Kesenjangan Internal</p> <p>Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan Inspektoral karena belum adanya komitmen dari Walikota tentang Anggaran berbasis gender sebagai landasan yang mengatur tentang PPRG, akibatnya tidak menjadi suatu target dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan (Dari SKPD)</p>	<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <p>Pada masing-masing SKPD belum memahami sepenuhnya tentang anggaran yang berbasis gender maka belum adanya keseriusan dalam merealisasikan tentang PPRG</p>	<p>Reformulasi Tujuan</p> <p>Dalam melaksanakan pembangunan fisik kedepan harus memperhatikan apakah sudah berorientasi gender atau belum, agar hasil pembangunan tersebut dapat dirikmati oleh semua umur baik laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak, maupun bagi penyandang cacat</p>	<p>Rencana Aksi</p> <p>Program PPRG kedepan pada setiap SKPD harus ada tertuang pada Renja SKPD, yang mempunyai dampak positif yang luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.</p>	<p>Basis Data (Base-Line)</p> <p>Basis data yang digunakan harus data yang update yang dapat digunakan banyak kepentingan.</p>

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : UPTD PUSKESMAS PARIAMAN

PROGRAM : PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
<p>Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan</p> <p>Program : Peningkatan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan : Pemberian imunisasi</p> <p>Tujuan : Untuk meningkatkan system imunitas pada anak terhadap penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi.</p>	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi pada anaknya, terutama tidak adanya dukungan dari ayah.</p> <p>Pencapaian masih pada angka 90 %, sementara target yang harus dicapai adalah 95%</p>	<p>Faktor Kesenjangan</p> <p>1. Akses: dalam pelaksanaannya yang sering membawa anaknya untuk imunisasi adalah ibu, baru sebagian kecil yang di antar ayahnya.</p> <p>2. Partisipasi: partisipasi ayah masih kurang dalam pelaksanaan imunisasi, bahkan ada yang melarang anaknya untuk di imunisasi.</p> <p>3. Kontrol:</p> <p>4. Manfaat: untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit.</p>	ISU GENDER		<p>Reformulasi Tujuan</p> <p>Melakukan upaya-upaya yang dapat membuka wawasan ayah agar dapat berperan aktif dan mendukung kegiatan pemberian imunisasi pada anak.</p>	<p>Rencana Aksi</p> <p>Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan tentang imunisasi kepada ayah yang di dampingi oleh tokoh agama.</p>	<p>Basis Data (Base-Line)</p> <p>Target imunisasi 95 % Capaian 90%</p>
			<p>Sebab Kesenjangan Internal</p> <p>Puskesmas Pariaman belum membuat anggaran berdasarkan PPRG berupa sosialisasi dan penyuluhan yang di berikan khusus kepada ayah untuk mendukung kegiatan imunisasi.</p>	<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <p>Adanya paham-paham ke agamaan yang tetap kukuh dengan paham bahwa imunisasi itu haram meskipun sudah ada ketetapan dari MUI bahwa imunisasi itu dibolehkan.</p>			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : SATPOL.PP KOTA PARIAMAN

PROGRAM : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	PENGUKURA
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	
<p>Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan Perda Keamanan Lingkungan dan Ketertiban Umum</p> <p>Tujuan : Terlaksananya pembinaan masyarakat melalui penyuluhan Perda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Target untuk pelatihan sebanyak 566 orang - Yang mengikuti pelatihan adalah laki-laki dan perempuan - Jumlah Peserta laki-laki yang mengikuti pelatihan lebih banyak dari peserta perempuan - Penyuluhan Perda yang diberikan diantaranya : Perda Pekat , Perda IMB, Perda K3, Perda Reklame, Perda Gedung dan Bangunan. - Kasus yang paling banyak terjadi diantaranya : kasus pekat dan IMB 	<p>1. Peserta perempuan masih kurang berperan serta dalam mengikuti penyuluhan Perda</p> <p>2. Peserta perempuan kesulitan untuk mengikuti pelatihan dikarenakan kesibukan rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pahamnya konsep gender oleh internal dalam kegiatan penyuluhan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda yang telah ditetapkan Waktu pelaksanaan kegiatan di pagi hari, sehingga susah bagi peserta perempuan untuk datang 	<p>Terlaksananya pembinaan masyarakat melalui penyuluhan Perda yang responsiv gender</p>	<p>1. Diadakan kegiatan pelatihan perda yang lebih fokus kepada kasus yang sering terjadi selama Tahun 2017.</p>	<p>1. Jumlah peserta pelatihan 566 Orang</p> <p>2. Pelatihan ini sudah diadakan sebelumnya pada Tahun 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 355 orang</p>	<p>Inpp ke pe Rp Ou 56 Ke Pe Ge Ou Me pe ma Pe</p>